

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintah yang baik dibutuhkan untuk menjadi landasan pembangunan dan pembuatan kebijakan Negara yang demokratis dalam era globalisasi. Oleh karena itu tata pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu segera dilakukan agar segala permasalahan yang timbul dapat diminimalkan, dipecahkan dan juga dipulihkannya segala bidang dalam masyarakat agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Disadari, dalam mewujudkan tata pemerintahan membutuhkan waktu yang tidak singkat dan upaya yang didukung dari segala pihak dan dilakukan secara terus-menerus.

Dalam mewujudkan *good governance* terdapat beberapa prinsip yang harus dianut dalam praktek penyelenggaraannya. Menurut *United Nation Development Programme* (UNDP) dalam Sedarmayanti (2009) mengemukakan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, meliputi: Partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi *consensus*, berkeadilan, efektivitas dan efesiensi, akuntabilitas, dan bervisi strategis.

Berdasarkan prinsip yang ada, tata Pemerintah yang baik (*good governance*) salah satunya diwujudkan dengan sistem pengadaan barang/jasa yang efektif dalam lingkungan pemerintah. Pengadaan dalam kegiatan pemerintah dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik sehingga tercipta kesejahteraan rakyat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengadaan mempunyai peran penting dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan pemerataan ekonomi, memberikan perluasan kesempatan berusaha, meningkatkan peran serta UMKM, dan meningkatkan pengadaan berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Pengadaan barang memegang peranan dalam proses pembelian dan pemasokan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi maupun jasa lainnya yang diperlukan oleh instansi. Dan terdapat beberapa metode pemilihan, yaitu secara *E-purchasing*, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjalankan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) yang memiliki fungsi untuk membuat berbagai kajian ilmiah tentunya membutuhkan pengadaan barang langsung yang digunakan sebagai penunjang fasilitas kantor dan menjadi kebutuhan penting untuk menjalani kegiatan yang berlangsung. Pengadaan barang didalam Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang merupakan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), anggaran yang diterima kemudian diolah sendiri sesuai dengan keperluan instansi. Dalam menjalankan proses pengadaannya, metode pemilihan yang digunakan adalah pengadaan langsung yang dilaksanakan untuk barang yang bernilai paling banyak RP.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan dilakukan melalui sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Sehingga perlu diperhatikan pengendalian internal pada pengadaan pembelian barang agar tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan, pelaporan dan lainnya. Dalam pelaksanaan pengadaan barang,

Pemerintah Kabupaten Malang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang memuat segala aspek pengadaan yang ada di sektor pemerintahan. Mulai dari proses identifikasi kebutuhan sampai serah terima hasil pekerjaan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Sistem Informasi Pengadaan Barang Langsung melalui LPSE pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apa saja fungsi yang terkait dalam proses pengadaan barang langsung di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang?
2. Apa saja dokumen dan pencatatan akuntansi yang digunakan pada proses pengadaan barang langsung di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang?
3. Bagaimana prosedur serta bagan alir (*flowchart*) pengadaan barang langsung pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang?
4. Bagaimana sistem pengendalian internal yang terdapat dalam pengadaan barang langsung pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang?

1.3 Tujuan

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menguraikan fungsi yang terkait dalam proses pengadaan barang langsung di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang.
2. Menguraikan dokumen dan pencatatan akuntansi yang digunakan pada proses pengadaan barang langsung di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang.
3. Menjelaskan prosedur serta bagan alir (*flowchart*) pengadaan barang langsung pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang.
4. Menjelaskan sistem pengendalian internal yang terdapat dalam pengadaan barang langsung pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang.

1.4 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari Laporan Tugas Akhir ini adalah :

1.4.1 Manfaat Bagi Penulis

Dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dari hasil penelitian dan berguna bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

1.4.2 Manfaat Bagi Perusahaan

Dapat memberikan solusi dan informasi yang berguna bagi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang. Sehingga, kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang dapat lebih meningkat.

1.4.3 Manfaat Bagi Akademik

Sebagai bahan referensi dan acuan dalam pembuatan laporan bagi mahasiswa lainnya khususnya dibidang Sistem Informasi Akuntansi.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

